

**ANALISIS PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI, PEMERATAAN,  
EFISIENSI INTERNAL PENDIDIKAN  
DI KABUPATEN KLATEN  
(ANALYSIS OF RELEVANCE AND QUALITY IMPROVEMENT, EQUITY,  
INTERNAL EFFICIENCY EDUCATION  
IN THE DISTRICT KLATEN)**

**Soebandriyo**

*Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah*

Email: rioavanza2004@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*Descriptive nature of qualitative research with the aim of the study 1. To find out the distribution of education, 2. To find an increase in the quality and relevance of education, 3. Results of research to determine the internal efficiency of education. Development of Education in terms of educational equity can be explained by several indicators such as number Partisipai Rough (GER), Pure's participation rate (NER), Ratio of Education, and the percentage of the transition rate. Based on the existing APK APK apparently highest in SD / MI is 123.01 percent and the lowest at the high school level + MA is 75.27 percent, while for the junior level at 95.37 percent + MTs. Based quality indicators, namely the coarse input rate (MCA) SD / MI by 90.27 percent, to repeat the numbers, it turns out the biggest repeat numbers found on the SD / MI is 3.88 junior / MTs of 0.14 and SM + MA is equal to 0.15. The next largest dropout rate contained in the MA + SM rate by 0.84 percent and the lowest in SD / MI in the amount of 0.06 per cent followed by 0.20 percent junior. For the primary level to the level of SM using the same indicators between the internal efficiency of education. Indicators may include the number of outputs, number of students, number of dropouts, the number of repeats, length of study, students wasted years, the ratio of inputs per input and output and input, it is known that the amount of output that is best approached in terms of the number 1000 is on the high school level + MA greatest value that is equal to 997, and the smallest are in the junior secondary vocational school for 956 + MTS was 996, while for the MI + SD of 986.*

**Keywords:** *Education, quality, equity, relevance.*

**PENDAHULUAN**

Kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas diawali dari adanya program pendidikan yang bermutu. Salah satu kebijakan tersebut adalah adanya program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun ini dicanangkan pada tahun 1994 yang merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 6 tahun. sejak tahun 1984, tepatnya pada masa Menteri Pendidikan Nugroho Notosusanto

pendidikan wajib belajar 9 tahun sudah ditetapkan. Namun pada waktu itu pendidikan belum dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia. Sebab, akses ekonomi masyarakat Indonesia belum mencukupi untuk bisa mengenyam pendidikan secara komplit. Padahal, bagi bangsa Indonesia pendidikan sesungguhnya adalah komitmen antara Pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun sejalan dengan semangat untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan, jalan satu-satunya adalah dengan pendidikan. Pada batang tubuh Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas lagi menyatakan”

(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, dan ” (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Kemudian, pada masa reformasi diamandemen dan ditambah ayatnya, yakni: (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Bahkan, program wajib belajar sembilan tahun mengakomodir semangat pendidikan secara Internasional. Pengakuan bahwa pendidikan merupakan hak setiap umat manusia termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang pada Pasal 26 ayat 1 berbunyi “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama, berdasarkan kepantasan.”

Upaya untuk pemerataan pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun dan meningkatkan kapasitas membaca masyarakat, pada dasarnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas SDM, dimana pendidikan (tingkat partisipasi sekolah), maupun kemampuan membaca merupakan faktor penting di dalamnya, pada masa Orde baru upaya untuk pemberantasan buta huruf cukup masif demikian juga dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang terus dilakukan, pada tahun 1984 dicanangkan Wajib 6 tahun, sepuluh tahun kemudian dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimuali sejak tahun 1994, dan belakangan ini Wajib Belajar Pendidikan Dasar telah menjadi komitmen bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.

Dalam perspektif teoritis, upaya peningkatan Pendidikan masyarakat merupakan dua perspektif tinjauan terhadap wajib belajar (*compulsory education*) yakni 1) *inward perspective* yaitu peningkatan kualitas Sumber daya manusia, dan 2) *outward perspective* yaitu persiapan menghadapi globalisasi yang makin kompetitif. Kondisi ini nampaknya telah mendorong Depdiknas untuk menjabarkan Visinya dengan keinginan untuk pada tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia yang cerdas dan Kompetitif, dan untuk itu berbagai kebijakan pendidikan dilakukan agar dapat mewujudkannya

Kedua perspektif tersebut akan mempunyai implikasi sendiri-sendiri, perspetif *outward* mensyaratkan suatu kemampuan adopsi dan adaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, hal ini tentu saja memerlukan kemampuan anggaran yang cukup besar baik dari pemerintah sebagai pelaksanaan kewajiban konstitusi

maupun masyarakat sebagai konsumen primer pendidikan persekolahan.

Sementara itu dari perspektif *inward*, variasi kemampuan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan sosial (orientasi dan harapan terhadap pendidikan/persekolahan/peran pengetahuan) sangat perlu mendapat perhatian, hal ini penting agar pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan upaya peningkatan pendidikan masyarakat tidak hanya sebagai keinginan (*wishful thinking*) melainkan sesuatu yang *objektif, feasible*, dan *applicable*. Perspektif ke luar keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh bagaimana menata program wajib belajar/peningkatan pendidikan masyarakat dalam perspektif ke dalam dan itu hanya mungkin terlaksana dengan baik apabila kebijakan yang dilakukan berdasarkan temuan-temuan faktual (data) hasil dari suatu penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga kebijakan yang dilakukan merupakan representasi yang tepat dari tuntutan kebutuhan masyarakat.

Kondisi yang diharapkan tersebut jelas memerlukan kebijakan yang memungkinkan semua penduduk usia tertentu dapat mengikuti pendidikan dalam tataran minimal sebagaimana tujuan dari wajar dikdas sembilan tahun. dalam konteks inilah masalah wajar dikdas nampaknya telah mendapat penekanan-penekanan sesuai dengan kondisi serta komitmen daerah. propinsi Jawa Barat dengan seluruh lapisan birokrasi pendidikannya pada tingkatan Kabupaten telah mencanangkan program percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang kemudian ditindak lanjuti dengan upaya-upaya melaksanakan hal tersebut dalam tingkatan Kabupaten.

Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, etnis, golongan dan hidup di bentangan pulau-pulau, besar dan kecil, memiliki penduduk dengan tingkat sosial, ekonomi dan latar belakang pendidikan

yang berbeda pula. Ada sebagian masyarakat yang sudah berpendidikan tinggi, namun tidak sedikit yang berpendidikan rendah, bahkan ada yang sama sekali belum mengenyam pendidikan. Dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, pemerintah telah mencanangkan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun pada tanggal 2 Mei 1994. Wajib belajar sangat penting bagi suatu bangsa. Kalau tidak diberi ketentuan secara resmi adanya wajib belajar sekurang-kurangnya suatu bangsa harus menyadari bahwa untuk kepentingan masa depannya negara harus bersedia untuk melakukan usaha pendidikan yang sebaik-baiknya yang disertai dengan *investment* kepada berbagai kemampuan manusia.

Negara Indonesia akan tetap eksis di lingkungan global bila setiap produknya memiliki daya saing yaitu berorientasi pada efisiensi dan kualitas, apalagi dengan adanya perdagangan bebas (*free trade*) yang tidak mengenal batas-batas wilayah administrasi (Mustopadidjaja, 2002). Oleh karena itu perlu penyiapan sumberdaya-sumberdaya seperti *man, money, method, machine, material, market* dan *information* (Irawan, *et.al.*, 2000). Diantara sumberdaya-sumberdaya tersebut, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor sentral karena bagaimanapun bentuk serta tujuan organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia (Tarumingkeng, 2002). Sumber daya manusia yang berkualitas tersebut tentunya yang diperlukan baik secara kuantitas maupun kualitas dan hal itu dapat diperoleh/dikembangkan melalui pendidikan. Tujuan pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Kedua jalur pendidikan tersebut seharusnya berjalan secara simultan agar tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercapai dengan baik. Demikian juga pendapat Papayangan dalam Sufyarma (2004:37) bahwa sumber daya manusia yang berkualitas dikembangkan melalui banyak cara, antara lain melalui pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Melalui proses pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas dapat diperoleh/dikembangkan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Oleh karena itu, pendidikan nasional memiliki visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan produktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional, yaitu: 1). Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia, 2). Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. 3). Meningkatkan

kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, 4). Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, 5). Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. Pembangunan pendidikan di Indonesia belum mencapai hasil yang memuaskan.

Tidak ada bangsa yang maju tanpa adanya usaha tersebut. Oleh karena itu, adanya keputusan Pemerintah masa lalu untuk melakukan wajib belajar adalah suatu keputusan yang sangat luhur. Langkah ini merupakan hal yang sangat penting dan berarti untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia agar mampu bersaing bahkan lebih maju dari bangsa lain. Pengertian wajib belajar di sini adalah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia yang berumur 7 (tujuh) tahun lebih untuk mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat. Keberhasilan Wajib Dikdas 9 tahun akan sangat membantu upaya pengentasan bangsa dari keterbelakangan dan kemiskinan. Indikator keberhasilan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat diketahui dari angka partisipasi siswa menjadi peserta didik. Data tersebut lazim dihitung dengan: 1). Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu perbandingan antara jumlah peserta didik (SD) usia 7-12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan 100, 2). APM untuk tingkat SLTP yaitu perbandingan antara jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikalikan dengan 100.

Perkembangan pendidikan dilihat dari segi pemerataan pendidikan dapat

dijelaskan dengan beberapa indikator antara lain: Angka Partisipasi Kasar (KPK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio Pendidikan, dan Prosentase Angka Melanjutkan. Pada tahun 2012 berdasarkan APK yang ada ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 123,01% dan yang terendah di tingkat SMA/MA yaitu 75,27%, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs sebesar 95,37%. Tingginya APK salah satu faktor penyebabnya adalah adanya siswa sekolah di luar sekolah yang berada di jenjang tersebut dan di akibatkan banyaknya jumlah murid yang berasal dari luar Kabupaten Klaten. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan jender dilihat dari APK pada tingkat SD/MI dibandingkan dengan SLTP/MTs untuk laki-laki sebesar 123,31 %, untuk perempuan 122,70%, sedangkan untuk SLTP/MTs APK untuk laki-laki sebesar 93,22% dan untuk APK perempuan sebesar 97,58%, sedangkan untuk tingkat SLTA untuk APK laki-laki sebesar 75,55% dan untuk APK SLTA perempuan sebesar 81,45%. Efisien atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun siswa terbuang dan putus sekolah. Pada tahun 2012 untuk jumlah tahun siswa terbuang dan putus sekolah terbaik terdapat SMP/MTs sebesar 15, untuk tingkat SD/Mi sebesar 704 dan 16 untuk SMA/MA, sedangkan SM/SMK sebesar 63. Dengan mendasarkan pada indikator tersebut diatas untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat SD/MI memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional merupakan alat dan sekaligus tujuan yang sangat penting dalam perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Hal ini terutama jika dikaitkan

dengan peran dan fungsi pendidikan nasional dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Pendidikan nasional merupakan alat yang sangat fungsional dalam upaya pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang berkualitas dan mampu mandiri serta dalam rangka pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh; yang mengandung makna terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 2 Tahun 1989). Dengan perkataan lain, pendidikan nasional berfungsi sebagai alat utama untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa.

Program Wajib Belajar pada hakekatnya merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas manusia Indonesia, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan pembangunan nasional serta adaptif dalam penyerapan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang muaranya adalah mendekatkan pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, Program Wajib Belajar juga merupakan salah satu pengembangan skenario pendidikan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar bagi setiap warga negara. Kebijakan tersebut merupakan salah satu penjawantahan isi Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia mengandung arti sebagai universal primary education, yaitu terbukanya kesempatan secara luas bagi semua peserta didik untuk memasuki pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya

adalah menumbuhkan aspirasi orangtua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan.

Adapun ciri-ciri Wajib Belajar yang selama ini berlangsung di Indonesia adalah: 1) Tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, 2) Tidak ada sanksi hukum, dan yang lebih menonjol adalah aspek moral yakni orang-tua dan peserta didik merasa terpancung untuk mengikuti pendidikan dasar karena berbagai kemudahan telah disediakan, 3) Tidak diatur dengan undang-undang tersendiri. 4) Keberhasilan diukur dengan angka partisipasi. Mengingat peranan Wajar Dikdas 9 Tahun sangat strategis dalam pembangunan bangsa, maka BPPN memandang perlu untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya yang selama ini berlangsung, untuk kemudian menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Dalam pembangunan sekarang, masih ditemukan berbagai kesenjangan di masyarakat. Yang antara lain disebabkan oleh faktor kondisi geografis ataupun sosial budaya, sehingga dapat menyebabkan ketertinggalan dalam berbagai hal. Salah satu di antaranya yang kita bahas sekarang ialah ketertinggalan masalah pendidikan jalur luar sekolah yang bila tidak segera diatasi, ketertinggalan di bidang pendidikan tetap selalu muncul. Namun, dalam postulat yang ada bagi masyarakat desa tertinggal selama ini, belum dirasakan rendahnya pendidikan dapat berakibat suramnya masa depan mereka. Dengan demikian, tanpa peningkatan pendidikan, baik jalur sekolah maupun luar sekolah maka kualitas SDM kita tidak akan meningkat.

### **Indikator Pemenuhan SPM**

Kenyataan-kenyataan tersebut, membawa kita pada satu konsekuensi logis bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi pendidikan dan kesejahteraan guru di daerah perbatasan.

Untuk tujuan tersebut, setidaknya ada Lima langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, membangun sarana dan prasarana pendukung pendidikan seperti gedung sekolah, perpustakaan, alat-alat praktek dan fasilitas belajar lainnya. Kedua, meningkatkan kesejahteraan guru di daerah perbatasan melalui gaji yang layak dan tunjangan hari tua. Ketiga, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan-pelatihan, keempat, mengembangkan kurikulum yang sesuai untuk diterapkan di daerah perbatasan serta kelima menambah jumlah sekolah yang dapat terjangkau oleh masyarakat perbatasan yang berada jauh di pelosok Najmu Laila (2009).

Dari kondisi permasalahan tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1). Bagaimana untuk mengetahui pemerataan pendidikan? 2). Bagaimana untuk mengetahui peningkatan mutu dan relevansi pendidikan? dan 3). Bagaimana untuk mengetahui efisiensi internal pendidikan di Kabupaten Klaten?

Tujuan penelitian untuk memperoleh data empiris, yaitu dengan cara mengidentifikasi, dan menganalisis tentang: 1) Untuk mengetahui pemerataan pendidikan di Kabupaten Klaten, 2) Untuk mengetahui peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di Kabupaten Klaten, dan 3) Untuk mengetahui efisiensi internal pendidikan di Kabupaten Klaten.

### **BAHAN DAN METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif.

Sampel dalam penelitian ini antara lain adalah pejabat Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, BAPPEDA, Guru, Siswa, dan Orang Tua Murid Kabupaten Klaten. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

dikelompokkan menjadi dua, yaitu data utama (Primer) dan data pendukung (Sekunder). Data utama diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam kegiatan sebagai fokus penelitian. Yang terlibat sebagai informan dalam penelitian ini adalah: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, BAPPEDA, Kepala Sekolah, Guru, Siswa. Sedangkan data pendukung bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang ada, baik berasal dari BPS, Bappeda maupun Dinas P dan K Kabupaten Klaten. Pada tahap pengumpulan data ini, peneliti menggunakan teknik: 1) Wawancara mendalam (*indepth interview*). 2) Observasi partisipasi, 3) Dokumentasi, dan 4) Kuesioner.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Triangulasi. Data primer yang terkumpul harus segera dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif versi Miles dan Huberman. Ada beberapa cara untuk menganalisis data dengan model penelitian kualitatif versi Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL**

#### **a. Geografis.**

Secara geografis Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan.

Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 665,56 km<sup>2</sup>. Di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali.

Menurut topografi kabupaten Klaten terletak di antara gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.

Ditinjau dari ketinggiannya, wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan pegunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut. 77,52% terletak di ketinggian 100-500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-1000 meter dari permukaan air laut.

#### **b. Demografi**

Berdasarkan Undang-undang, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuan pendidikan adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan. Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten adalah 1.307.472 orang. Dari jumlah tersebut, 91.095 berusia 7-12 tahun (6,97%), 54.331 berusia 13-15 tahun (4,16%) dan 54.531 berusia 16-18 tahun (4,16%). Tingkat pendidikan penduduk yang dirinci menjadi 9 kategori dapat digambarkan sebagai berikut:

- (1) Tidak/belum pernah sekolah sebanyak 1.244 orang (12,44%).
- (2) Tidak/belum tamat SD sebanyak 1.346 orang (13,46%).

- (3) Tamat SD sebanyak 2.2933 orang (29,33%).
- (4) Tamat SLTP sebanyak 1.830 orang (18,30%).
- (5) Tamat SMA sebanyak 973 orang (9,73%).
- (6) Tamat SMK sebanyak 177 orang (1,77%).
- (7) Tamat Diploma I dan II sebanyak 994 orang (9,94%).
- (8) Tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 169 orang (1,69%).
- (9) Tamat sarjana 394 orang (3,94%).

### **c. Pendidikan**

Kemajuan pendidikan di Kab. Klaten cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya sarana belajar mengajar diberbagai jenis dan jenjang pendidikan. Secara rinci, pembangunan disetiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD, tingkat SLTP serta tingkat SM.

#### **1. Tingkat TK dan RA**

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2011/2012, lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Klaten berjumlah 592 dengan jumlah murid sebanyak 18.432 dengan tenaga pengajar sebesar 1.724 guru, adapun kelas yang ada berjumlah 1.724 kelas dan untuk lulusan berjumlah 9.693 orang. Untuk jenjang RA/BA terdapat 328 lembaga dengan jumlah siswa sebanyak 11.565, dengan tenaga pengajar sebanyak 880 orang, dan untuk kelas berjumlah 782 kelas dengan jumlah lulusan sebanyak 6.087 orang.

#### **2. Tingkat SD (SD dan MI)**

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2011/2011, jumlah SD dan MI sebanyak 877, siswa baru tingkat I sebesar 17.267, siswa seluruhnya sebesar 111.881,

dan lulusan sebesar 17.000. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak 5.038, dengan rincian 3.712 memiliki kondisi baik, 1.290 kondisi rusak ringan dan 426 kondisinya rusak berat. Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 8.770 diantaranya yaitu 7.413 (84,53%) adalah layak mengajar, dan 1.357 (15,47%) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 276, lapangan , ruang UKS sebanyak 272, Tempat Ibadah sebanyak 176, Toilet 2.960, dan terdapat 801 saluran air bersih. Pada tabel berikut digambarkan pula bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI. Hal ini terlihat disemua data yang ada, jumlah SD sebesar 806, dengan jumlah siswa sebanyak 104.700, dan ruang kelas milik sebesar 4.552 dan ditangani oleh guru sebanyak 7.756, Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 276, dan ruang UKS sebanyak 272. Sedangkan untuk jumlah MI sebesar 73 lembaga dengan jumlah siswa 7.181, sedangkan ruang kelas milik sebanyak 486 dan tenaga guru yang mengajar sebanyak 732 guru. Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SD jika dibandingkan dengan MI. sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta, sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan Sekolah.

#### **3. Tingkat SLTP (SMP dan MTs)**

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2011/2012, jumlah SMP dan MTs sebanyak 132, dengan siswa baru tingkat I sebanyak 17.494 siswa seluruhnya sebanyak 50.773 dan lulusan sebanyak 16.759. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak 1.615, dengan rincian 1.404



memiliki kondisi baik, 209 dengan kondisi rusak ringan dan yang rusak berat 21. Sedangkan jumlah kelas sebanyak 1.517 sehingga terdapat shift sebesar 0,91. Dan untuk Guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 4.201 diantaranya guru sebanyak 3.293 (85,55%) adalah layak mengajar, 556 (14,45%) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 108, lapangan olahraga sebanyak 12, ruang UKS sebanyak 105, Fasilitas laboratorium sebanyak 118, untuk tempat ibadah sebanyak 94, saluran air bersih semua sekolah sudah memiliki yaitu sebanyak 132, fasilitas toilet dan listrik semua sekolah sudah ada (Tabel 2.8) Pada table 2.9 juga digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs. Hal ini terlihat disemua data yang ada, jumlah SMP sebanyak 107 dengan jumlah siswa sebanyak 44.690 dengan ruang kelas sebanyak 1429 dan ditangani oleh guru sebanyak 3.601. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 93, lapangan olahraga sebanyak 11, ruang UKS sebanyak 95 dan ruang laboratorium sebanyak 107, sedangkan untuk MTs hanya berjumlah 25 lembaga dengan jumlah siswa sebanyak 6.083 siswa dengan jumlah guru sebanyak 600 guru.

#### **4. Tingkat SM (SMA/SMK dan MA)**

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2011/2012, jumlah SMA, SMK dan MA sebanyak 89, siswa baru tingkat I sebanyak 13.988 dengan jumlah siswa seluruhnya sebanyak 42.434, dan lulusan sebanyak 13.088. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak 1.324, dengan rincian 1.243 kondisi baik, sedangkan untuk kondisi rusak ringan 62 dan rusak berat sebanyak 3, jumlah kelas sebanyak 1.230, guru yang mengajar di SMA, SMK dan MA sebanyak 3.539 di antaranya yaitu sebanyak

3.274 (92,51%) adalah layak mengajar, 265 (7,49%) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 71, lapangan olahraga sebanyak 4 ruang UKS sebanyak 85, fasilitas laboratorium sebanyak 233, ruang ketrampilan sebanyak 23 dan berada pada jenjang SMK, untuk ruang BP sebanyak 212, ruang serbaguna sebanyak 20, dan ruang praktik sebanyak 66 berada pada jenjang SMK (Tabel 2.9) Bila dibandingkan antara siswa SMA dengan SMK yaitu 13.499 dan 26.965, maka jumlah siswa SMK lebih besar. Hal ini disebabkan jumlah SMK juga lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah SMA, sesuai dengan banyaknya siswa yang ada, lulusan SMK juga lebih banyak jika dibandingkan dengan lulusan SMA, yaitu 4.446 untuk SMA dan 8.182 untuk SMK, hal ini juga berkaitan dengan program pemerintah propinsi dengan 40 : 60 % . Selanjutnya jika dilihat dari guru yang layak mengajar, ternyata paling banyak di SMK yaitu sebanyak 1.845 , MA yaitu sebanyak 196, dan untuk SMA sebanyak 1.236. Bila dilihat fasilitas sekolah yang seharusnya ada, ternyata tidak semua fasilitas yang ada dimiliki oleh SMA, SMK dan MA. Perpustakaan, lapangan olahraga, UKS terdapat ditiga jenis sekolah, runa praktik hanya di SMK. Kondisi sekolah yang tidak memiliki fasilitas tersebut hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan fasilitas tersebut.

#### **5. Pendidikan Luar Biasa**

Pada Tahun Pelajaran 2011/2012 jumlah SLB di Kabupaten Klaten berjumlah 11 lembaga yang terdiri dari TKLB 11 lembaga, SDLB sebanyak 11 lembaga, SMPLB sebanyak 9 lembaga dan SMALB sebanyak 5 lembaga, dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 854 siswa, dengan ruang kelas sebanyak 144 ruang, untuk

menunjang proses belajar (PBM) di LSB tersedia guru sebanyak 143 orang.

## **6. Pendidikan Non Formal (PNF) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan pula melalui pendidikan non formal. Penyelenggaraan pendidikan non formal diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan ketrampilan berwirausaha/kewirausahaan sebagai bekal dalam bekerja dan berusaha. Program Pendidikan Non Formal meliputi:

- (1) Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional,
- (2) Paket A setara SD/MI,
- (3) Paket B setara SMP/MTs,
- (4) Paket C setara SMA/MA,
- (5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- (6) Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Keluarga.

### **a. Kelompok Bermain.**

Untuk kelompok bermain yang ada di Kabupaten Klaten berjumlah 155 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 7.349 siswa, yang terdiri dari peserta didik laki-laki berjumlah 2.489 peserta didik, dan yang perempuan sebanyak 4.860 peserta didik, dengan jumlah pendidik sebanyak 613 orang.

### **b. Tempat Penitipan Anak**

Di Kabupaten Klaten jumlah tempat penitipan anak yang dibawah naungan Pendidikan Non Formal 9 lembaga, dengan jumlah anak yang dititipkan sebanyak 277 orang dengan pengasuh sejumlah 37 orang.

### **c. PAUD**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak, jadi bukan hanya sekedar untuk memberikan pengalaman belajar, program pendidikan berkelanjutan

dimaksudkan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Berdasarkan data Tahun 2010/2011 bahwa lembaga PAUD di Kabupaten Klaten berjumlah 133 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 4.852 anak dan tenaga pendidik sebanyak 539 orang.

### **d. TPQ**

Pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) adalah pendidikan non formal yang dikembangkan di Kabupaten Klaten dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dan peningkatan ahlaq mulia peserta didik, adapun jumlah lembaga TPQ di Kabupaten Klaten berjumlah 180 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 12.597 dengan jumlah pendidik/pengajar sebanyak 1.048 orang.

### **e. Keaksaraan Fungsional**

Satuan pendidikan dalam pendidikan non formal adalah kelompok belajar (Kejar) Keaksaraan Fungsional peserta didik pada jalur pendidikan non formal disebut warga belajar (WB). Sedangkan tenaga kependidikannya dikenal dengan sebutan sumber belajar/tutor belajar. Untuk Keaksaraan Fungsional (KF) di kabupaten Klaten berjumlah 143 KF yang tersebar pada tiga kecamatan, dengan jumlah peserta didik berjumlah 740 peserta, dengan jumlah pendidik/tutor sejumlah 378 orang.

### **f. Kejar Paket**

Berdasarkan data Tahun 2010/2011 jumlah kejar Paket A sebanyak 10 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 177 orang dengan jumlah tutor sebanyak 18 orang, untuk kejar Paket B berjumlah 39 Kejar dengan jumlah siswa sebanyak 865 orang dengan jumlah tutor sebanyak 86,, dan untuk Kejar Paket C sebanyak 12 Kejar dengan jumlah peserta didik sebanyak 340

orang dengan jumlah tutor sebanyak 86 orang.

#### **g. Kursus**

Berdasarkan data Tahun 2010/2011 Kursus di kabupaten Klaten berjumlah 118 lembaga kursus dengan jumlah peserta didik mencapai 3.295 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 283 orang

#### **h. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)**

Dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di segala lapisan masyarakat, maka di Kabupaten Klaten dibentuk sebuah lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk dapat memperkaya pengetahuan yakni dengan membentuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM), adapun TBM di Kabupaten Klaten berjumlah 23 TBM dengan pengelola 1 orang setiap TBM tersebut.

### **B. PEMBAHASAN**

Kinerja pendidikan dasar dan menengah yang meliputi sebagai berikut:

#### **a. Pemerataan Pendidikan**

Perkembangan Pendidikan dilihat dari segi pemerataan pendidikan dapat di jelaskan dengan beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio Pendidikan, dan prosentase angka melanjutkan. Berdasarkan APK yang ada ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 123,01% dan yang terendah di tingkat SM+MA yaitu 75,27%, sedangkan untuk tingkat SMP+MTs sebesar 95,37%. Tingginya APK salah satu faktor penyebabnya adalah adanya siswa sekolah di luar sekolah yang berada di jenjang tersebut dan juga diakibatkan banyaknya jumlah murid yang berasal dari luar Kabupaten Klaten. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan jender dilihat dari APK pada tingkat SD/MI dibandingkan dengan SLTP/MTs maupun

SMA/MA, dimana untuk SD/MI APK untuk laki-laki sebesar 123,31%, untuk perempuan 122,70%, sedangkan untuk SLTP/MTs APK untuk laki-laki sebesar 93,22% dan untuk APK perempuan sebesar 97,58%, sedangkan untuk tingkat SLTA untuk APK laki-laki sebesar 75,55, dan untuk APK SLTA Perempuan sebesar 81,45.

Dan untuk APM yang tertinggi juga terdapat di tingkat SD/MI yaitu 105,79% dan terendah di tingkat SM+MA yaitu 52,85%, sedangkan untuk tingkat SLTP sebesar 68,75%. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa tingkat SD Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan kinerja yang paling baik di tingkat SD Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terdapat di tingkat SM dengan angka 477 dan terjarang terdapat di tingkat SD dengan angka 127. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogen. Keheterogenan sekolah juga terlihat dari adanya tipe sekolah yaitu tipe A, B, C, dan kecil. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 36 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas terdapat di tingkat SLTP yaitu 33 dan terjarang terdapat di tingkat SD yaitu 22 dan untuk SMA sebesar 35. Rasio siswa per guru untuk tingkat SD yaitu 13, SMP dan MTs dan SMA yaitu 2, sedangkan untuk Rasio Kelas per Ruang kelas juga bervariasi yaitu untuk SD+MI 0,91, untuk SMP+MTs dan SM+SM sebesar 0,93. Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SD, SLTP dan SLTA cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SLTP juga cukup tinggi yaitu 102,91 sedangkan, angka melanjutkan ke tingkat SM+MA mencapai angka 83,45 besarnya angka melanjutkan

pada tingkat SLTP ini terjadi akibat banyaknya siswa yang melanjutkan dari luar daerah. Perbedaan pencapaian di tingkat SD, SLTP, dan SM juga karena akibat perbedaan kepadatan penduduk usia sekolah, kepadatan terbesar terdapat di tingkat SD sebesar 138,96 dan terkecil sebesar 82,88 terdapat di tingkat SLTP, dan untuk tingkat SLTA sebesar 86,71. Berdasarkan indikator yang terdapat pada Tabel 3.1 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SLTP dan tingkat SD kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut.

Indikator berikutnya membicarakan tentang Rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, Siswa per guru, Kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di SD dengan angka 136 dan yang terendah terdapat pada MI sebesar 50, untuk rasio siswa per kelas terbesar terdapat pada SD yaitu sebesar 22 dan MI sebesar 15. hal ini juga disebabkan karena jumlah lembaga SD lebih banyak dari jumlah lembaga MI. Rasio siswa per guru bervariasi dengan rasio terbesar SD yaitu 13 dan terkecil pada MI sebesar 10. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di MI dibandingkan dengan SD. Untuk rasio kelas per ruang kelas terkecil terdapat pada SD sebesar 0,91 sedangkan pada MI sebesar 0,95. Selain itu sesuai dengan jumlah sekolah, sedangkan untuk kelas per guru terkecil terdapat pada tingkat MI sebesar 0,57 dan untuk SD sebesar 0,59. Berdasarkan indikator pendidikan dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan MI. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya

nilai yang jauh lebih tinggi pada SD. Oleh karena itu agar kinerja SD sebanding dengan MI, maka diperlukan penanganan lebih lanjut untuk MI.

## **b. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan**

Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu:

- (1) Mutu masukan,
- (2) Mutu proses,
- (3) Mutu sumber daya manusia (SDM),
- (4) Mutu fasilitas, dan
- (5) Biaya. Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka masukan kasar (AMK) SD/MI sebesar 90,27%, untuk angka mengulang, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada tingkat SD/MI yaitu 3,88 tingkat SLTP/MTs sebesar 0,14 dan SM+MA yaitu sebesar 0,15 .

Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SM+MA yaitu sebesar 0,84 % dan terendah terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 0,06 % diikuti tingkat SLTP sebesar 0,20 %. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka tertinggi terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 99,66% dan terendah terdapat pada tingkat SLTP sebesar 98,29% , sedangkan untuk tingkat SM/MA sebesar 99,37%. Dengan melihat ketiga Indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SLTA. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi. Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SLTA yaitu 92,92% dan guru yang layak mengajar terendah adalah pada tingkat SD/MI sebesar 45,29%, sedangkan untuk tingkat SLTP sebesar 84,05%, sedangkan untuk guru yang tidak layak mengajar terbesar terdapat pada SD+MI sebesar 54,71% dan terendah terdapat pada SLTA sebesar 7,09%, dan

untuk tingkat SLTP sebesar 15,95%. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijazah guru–guru dengan bidang studi yang diajarkan.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SM+MA sebesar 93,88% sedangkan terendah terdapat SD+MI sebesar 66,85%, dan untuk SLTP sebesar 85,92%. sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 9,92% dan terendah terdapat pada SLTA sebesar 1,29%, dan untuk tingkat SLTP sebesar 0,23%. Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada, antara lain ruang perpustakaan, lapangan olahraga, ruang UKS, fasilitas laboratorium, Ruang BP, ruang serba guna, bengkel, dan ruang praktik lainnya.. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SLTP yaitu sebesar 81,82% dan terendah ada pada tingkat SD+MI sebesar 31,46%. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada tingkat SLTP yaitu sebesar 9,09% untuk tingkat SD/MI belum mempunyai. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar juga terdapat pada tingkat SLTA terbesar yaitu sebesar 95,51% dan terendah terdapat pada SD/MI sebesar 30,91%. Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, yayasan, orang tua siswa, pemda dan lainnya. Untuk tingkat SD+MI terbesar terdapat pada angka partisipasi pemda sebesar 62,48% sedangkan untuk tingkat SLTP prosentase terbesar terdapat pada tingkat pemda juga sebesar 63,38% dan untuk tingkat SM+MA prosentase terbesar juga terdapat pada angka partisipasi pemda juga sebesar 57,77%, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan sangat tinggi sekali.

Berdasarkan Indikator mutu pendidikan dan dengan melihat pencapaian setiap Indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SLTA mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD dan tingkat SLTP. Kinerja yang lebih unggul diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu tingkat tersebut.

### **1. Tingkat SD (SD dan MI)**

Berdasarkan mutu masukan untuk SD dan MI dapat diketahui angka masukan kasar (AMK) paling tinggi terdapat pada jenjang SD yakni sebesar 39,24 dan terendah terdapat pada MI sebesar 3,20, ini menunjukkan bahwa minat sekolah di SD lebih besar daripada MI. Berdasarkan Indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada SD yaitu sebesar 3,91 persen, terendah terdapat pada MI sebesar 3,52%, angka putus sekolah untuk SD sebesar 0,05 dan untuk MI sebesar 0,11, dan untuk angka lulusan tertinggi terdapat pada SD yaitu sebesar 99,68% sedangkan untuk MI sebesar 99,34. Dengan melihat ketiga Indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada SD. Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka %tase guru yang layak mengajar di MI lebih besar dari pada SD, yaitu sebesar 47,68% untuk tingkat MI dan 45,06% untuk tingkat SD. dan untuk guru yang tidak layak mengajar tertinggi terdapat pada SD,. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak terdapat pada SD yaitu sebesar 66,61%. dan kondisi rusak berat juga terdapat pada SD yaitu sebesar 10,16%, Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada, seperti perpustakaan, lapangan olahraga, UKS dan laboratorium. Untuk perpustakaan untuk MI belum memiliki perpustakaan, dimana untuk SD sebesar , dan

untuk jumlah lapangan olahraga SD dan MI juga belum memiliki ruang UKS lebih besar pada SD sebesar 3,63 untuk MI Juga belum memiliki. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut, maka SD memiliki angka terbesar. Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada SD sebesar 1.583,253 (dalam ribuan) sedangkan untuk MI sebesar 660.395. untuk Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat di SD, demikian juga partisipasi orang tua siswa. Berdasarkan Tabel 3.6 ternyata partisipasi pusat paling rendah jika dibandingkan dengan partisipasi lainnya. Berdasarkan Indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.6 dan dengan melihat pencapaian setiap Indikator untuk SD dan MI, maka dapat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan MI. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa Indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada SLTP yaitu sebesar 0,15% dan untuk tingkat MTs sebesar 0,07%. Angka putus sekolah antar SMP sebesar 0,19 MTs 0,20. Sedangkan angka lulusan tertinggi terdapat pada SMP sebesar 99,59% dan terkecil terdapat MTs sebesar 85,70%. Dengan melihat ketiga Indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada SMP. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di SMP Lebih besar dari pada di MTs, dengan rincian untuk tingkat SMP guru

yang layak mengajar sebesar 83,95%, yang tidak layak mengajar sebesar 16,18%, sedangkan untuk tingkat MTs guru yang layak mengajar sebesar 84,67%, dan untuk tidak layak mengajar sebesar 15,33%. Sedangkan untuk Indikator berikutnya adalah tentang mutu sarana dan prasarana pendidikan. Untuk ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak terdapat pada MTs yaitu sebesar 87,65% dan 86,94% untuk tingkat MTs. Sedangkan kondisi ruang rusak berat terbesar terdapat pada SMP sebesar 1,32 % dan untuk MTs hanya sebesar 1,02 %. Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada, meliputi jumlah perpustakaan, lapangan olahraga, UKS dan laboratorium. Jumlah perpustakaan terbesar terdapat pada tingkat SMP yaitu sebesar 68,92% dan MTs sebesar 60,00%. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada SMP yaitu sebesar 10,28 sedangkan untuk MTs sebesar 4,00%, ruang UKS lebih besar juga pada SLTP yaitu 88,79%, untuk ruang laboratorium SMP sebesar 39,72% dan untuk tingkat MTs sebesar 44,00%. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki keempat fasilitas tersebut, maka SMP memiliki angka terbesar. (Tabel 3.7) Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya partisipasi, dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, yayasan, orang tua, pemerintah daerah dan lainnya. Dari kelima angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar pada SMP terdapat pada angka partisipasi dari pemerintah daerah sebesar 66,89% dan untuk tingkat MTs angka partisipasi pemerintah daerah sebesar 32,33%. Sedangkan untuk satuan biaya untuk tingkat SMP sebesar 3.218.886.167 dan untuk tingkat MTs sebesar 2.986.855.210.

Berdasarkan Indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.7 dan dengan melihat pencapaian setiap Indikator untuk SMP dan MTs, maka dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul

dibandingkan dengan MTs. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian, kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut.

## **2. Tingkat SLTP (SMP dan MTs)**

Untuk melihat kinerja SMP dan MTs, indikator berikut tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terbesar terdapat di SMP dengan angka 384,64 sedangkan MTs sebesar 242. Hal itu menunjukkan bahwa SMP di daerah ini lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 36 anak, pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas di SMP sebesar 33 dan MTs sebesar 38.

Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar di SMP yaitu 12 sedangkan terkecil terdapat pada MTs sebesar 10. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di MTs jika dibandingkan dengan di SMP. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah di MTs yaitu sebesar 0,82, dan untuk MTs sebesar 0,93. Hal ini berarti bahwa pada MTs masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah ruang kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang tidak digunakan lebih dari sekali., dan untuk rasio kelas per guru rasio terbesar terdapat pada SMP yakni sebesar 0,36 dan untuk tingkat MTs rasionya sebesar 0,26.

Berdasarkan indikator yang terdapat pada Tabel 3.3 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMP dan MTs, maka dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan MTs. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat jenjang tersebut. Dengan demikian, untuk menghasilkan

kinerja yang sama antara SMP dan MTs perlu dilakukan penanganan lebih lanjut untuk jenjang MTs. Tambahan pula, kepadatan anak usia 13-15 tahun memang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi daerah. Bila hanya dilihat dari pendidikan semata, maka akan sulit dilakukan pemecahannya tanpa mengikutsertakan faktor diluar pendidikan yang mempengaruhi.

Untuk melihat kinerja SMA, SMK, dan MA, Indikator berikut membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di SMK dengan angka 519 diikuti tingkat SMA sebesar 476,29 dan MA sebesar 330. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah SMK lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 36 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas terbesar adalah MA sebesar 35 dan terkecil adalah jenjang SMK sebesar 33 sedangkan untuk jenjang SMA sebesar 34.

Rasio siswa per guru terbesar di SMK yaitu 13 dan diikuti SMA dan MA sebesar 10. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di SMK jika dibandingkan dengan di MA dan SMA, Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah di SMK yaitu sebesar 0,99, untuk tingkat SMA sebesar 0,85 dan MA sebesar 0,88. Berdasarkan Indikator yang terdapat pada Tabel 3.4 dan dengan melihat pencapaian setiap Indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa SMK mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut. Selanjutnya angka partisipasi dengan

keadaan sekolah. Bila dilihat rasio siswa per sekolah ternyata cukup tinggi yaitu 519.

### **3. Tingkat SM (SMA, SMK, dan MA)**

Berdasarkan data yang ada dapat diketahui bahwa indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, Angka mengulang terbesar terdapat pada SMK yaitu sebesar 0,27%, untuk SMA sebesar 0,09% dan untuk MA sebesar 0,08%, untuk angka putus sekolah terbesar terdapat pada MA yaitu sebesar 1,71%, dan terkecil terdapat pada SMA sebesar 0,15% dan untuk SMK sebesar 1,39%, sedangkan angka lulusan tertinggi terdapat pada MA sebesar 99,78% dan terkecil terdapat pada SMK sebesar 99,26 melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa mutu SMK, hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta lulusan yang tinggi. Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase tase guru yang layak mengajar di MA terbesar jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya yang setingkat yaitu 96,98% SMA sebesar 93,30% dan terkecil terdapat pada SMK sebesar 92,29%. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang mutu sarana dan prasarana pendidikan. Untuk tingkat SMA kondisi ruang kelas baik sebesar 94,54%, untuk MA sebesar 90,63% sedangkan untuk tingkat SMK kondisi ruang kelas baik sebesar 93,88%. Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah, Perpustakaan, ruang UKS dan ruang ketrampilan lebih banyak terdapat di SMK. Sedangkan lapangan olahraga, ruang laboratorium, ruang ketrampilan dan ruang BP lebih banyak terdapat di SMA. Dengan demikian bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketujuh fasilitas tersebut, maka SMK memiliki angka terbesar. Dengan melihat indikator mutu sarana prasarana

dapat dikatakan, bahwa SMA mempunyai mutu prasarana terbaik.

Indikator mutu dari segi biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, yayasan, orang tua, pemda dan lainnya siswa. Dari kelima angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar pada SMA terdapat pada Pemda sebesar 58,48%, untuk tingkat MA angka partisipasi terbesar terdapat pada angka partisipasi pemda sebesar 48,24% dan untuk tingkat SMK angka partisipasi terbesar terdapat pada partisipasi orang tua mencapai 44,75%. Dan untuk satuan biaya keseluruhan pada tingkat SMA sebesar 5.121.100.125 untuk tingkat MA sebesar 2.594.660.430 dan untuk tingkat SMK sebesar 3.898.198.055. Hal ini menunjukkan pemda dominan dalam perkembangan pendidikan di Kabupaten Klaten .

Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada data yang ada dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMA, SMK dan MA, maka dapat dikatakan bahwa SMK mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan SMA dan MA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut. Tidak seperti dua indikator sebelumnya yang menggunakan jenis indikator yang sama, indikator untuk relevansi antara tingkat SD, SMA, dan SMK berbeda. Untuk SD merupakan relevansi antara muatan lokal dengan mata pelajaran yang dikembangkan oleh daerah, untuk SMA merupakan relevansi antara siswa menurut jurusan di SMA dengan kriteria dan prosedur penjurusan di SMA, sedangkan untuk SMK adalah relevansi antara lulusan dengan yang diserap di sektor mata pencaharian. Oleh karena itu, analisisnya



juga dibedakan antara ketiga jenis sekolah tersebut.

### **c. Efisiensi Internal Pendidikan**

Untuk tingkat SD sampai tingkat SM menggunakan indikator yang sama antara efisiensi internal pendidikan. Indikator dimaksud meliputi jumlah keluaran, jumlah tahun siswa, jumlah putus sekolah, jumlah mengulang, lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masukan per input dan rasio keluaran dan masukan, diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1.000 adalah pada tingkat SMA+MA paling besar nilainya yaitu sebesar 997 dan terkecil terdapat pada SMK sebesar 956 untuk SLTP+MTS sebesar 996, sedangkan untuk SD+MI sebesar 986. Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 6000 telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu sebesar 6.215 untuk tingkat SD dan 3000 untuk tingkat SLTP dan SM, dan yang memiliki nilai terbesar adalah pada tingkat SLTP+MTs sebesar 2.999, SMA+MA sebesar 3.001 dan untuk SMK sebesar 2.951. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0%, terdapat pada SMA+MA yaitu sebesar 5, sedangkan terbesar terdapat pada SMK sebesar 75. sedangkan untuk jumlah mengulang terkecil terdapat pada SLTP, SM+MA yaitu 11 dan SMK yaitu sebesar 18 sedangkan terbesar terdapat pada jenjang SD+MI sebesar 675.

Untuk melihat efisiennya suatu sekolah dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa. Untuk tingkat SD/MI seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun dan tingkat SLTP dan SM+SMK seharusnya 3 tahun, sehingga tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan antara SD, SMP dan SM hampir kondisinya baik, yakni rata-

rata 6 untuk SD dan rata-rata 3 untuk SLTP dan SLTA. Bila dilihat putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah pada tingkat SMK yaitu sebesar 75 yang berhenti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Sedangkan untuk angka mengulang terbesar terdapat pada SD+MI sebesar 264%, dan terkecil terdapat pada tingkat SLTP+MTS sebesar 4.

Efisien atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun siswa terbuang. Untuk jumlah tahun siswa terbuang terbaik terdapat SMP+MTs sebesar 15, untuk tingkat SD+MI sebesar 704 dan 16 untuk SMA+MA, sedangkan SM+SMK sebesar 63. Dengan berdasarkan pada indikator tersebut diatas untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat SD/MI memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi.

Pemborosan biaya dihasilkan dari tidak efisiennya sistem pendidikan yang ada. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, karena adanya tahun-siswa terbuang yang makin besar menyebabkan terjadi pemborosan biaya yang besar juga. Pada Tabel 3.16 dicantumkan pemborosan biaya menurut jenis sekolah. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemborosan yang paling besar terjadi pada jenis sekolah SD+MI sebesar Rp 143.695.651.038.259, sedangkan pemborosan yang terkecil terdapat pada jenis sekolah SM+SMK yaitu sebesar Rp 9.440.417.599,-. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka perlu dikaji ulang sistem pendidikan yang ada. Kajian ini tidak hanya ditujukan pada jenis sekolah yang mengalami pemborosan biaya terbesar melainkan juga jenis sekolah yang lebih baik. Dengan adanya pemborosan ini, dapat disimpulkan bahwa jenis sekolah Menengah Atas memiliki kinerja yang

paling baik jika dibandingkan jenis sekolah dilihat dari segi pemborosan biaya

### **1. Tingkat SD ( SD dan MI )**

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah MI sebesar 991 dan SD sebesar 985. Jumlah tahun siswa yang seharusnya 6.000 terbesar berada pada tingkat SD yang mendekati 6.000 sebesar 6.271, dan sebesar 6.176 untuk MI. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0% adalah MI sebesar 2.87 dan SD sebesar 1,82 selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0% atau yang lebih baik adalah SD. sebesar 264 dan untuk MI sebesar 206 orang. Sehingga dilihat dari keempat indikator tersebut SD lebih baik efisiensi internalnya.

Untuk melihat lebih efisien mana SD atau MI juga dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SD seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah, untuk lama belajar lulusan terbaik terdapat pada SD yaitu sebesar 6,26 dan untuk MI juga sebesar 6,20. Berdasarkan lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah MI yaitu sebesar 2,87, sedangkan untuk SD sebesar 2,82 yang berarti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Rata-rata lama belajar kohort standar ideal dan norma nasional untuk SD/MI adalah 8, dilihat dari standar ideal tersebut SD mempunyai nilai terbaik yakni 6,20. Mana yang lebih efisien SD atau MI juga dapat dilihat dari tahun siswa terbuang yakni yang mendekati angka nol. Tahun-siswa terbuang karena mengulang lebih baik MI, sedangkan karena putus sekolah lebih baik juga terdapat pada tingkat SD

sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga SD. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka SD lebih baik jika dibandingkan dengan MI. Sedangkan untuk rasio keluaran pemasukan, nilai terbesar yaitu angka 1 terdapat pada MI. Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa MI memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator jika dibandingkan dengan SD. Akan tetapi dilihat dari prosentase jumlah SD dan jumlah siswa SD lebih besar dari MI maka secara kuantitatif maka kinerja SD lebih baik daripada kinerja MI.

### **2. Tingkat SLTP ( SMP dan MTs )**

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1000 adalah SLTP, yaitu sebesar 996 dan untuk MTs sebesar 993. Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 3000 untuk tingkat MTs ternyata sebesar 3.001 dan untuk SLTP 2.999. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0% adalah SMP sebesar 3 dan untuk MTs sebesar 4. Selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0% atau yang lebih baik adalah SMP sebesar 4 sedangkan untuk tingkat MTs sebesar 9.

Untuk melihat efisien mana SMP atau MTs dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa, untuk tingkat SLTP seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 3 tahun yaitu terdapat dapat SMP sebesar 3,00 dan untuk MTs sebesar 3,01, sedangkan untuk lama belajar putus sekolah terbaik terdapat pada SMP yaitu sebesar 1,87, dan nilai kohort sebesar 3,00 terdapat pada jenjang SMP dan MTs. Mana yang lebih efisien SMP atau MTs juga dapat dilihat dari tahun-siswa terbuang. Tahun-

siswa terbuang karena mengulang lebih baik adalah SMP, yaitu sebesar 13 dan 27 untuk tingkat MTs, sedangkan putus sekolah lebih baik atau nilai terkecil terdapat SMP yaitu sebesar 4 dan untuk MTs sebesar 7, sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga SMP. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka SMP lebih baik jika dibandingkan dengan MTs. Dengan mendasarkan pada 8 jenis indikator untuk efisien internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa jenjang SMP memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan MTs.

### **3. Tingkat SM ( SMA, SMK, dan MA )**

Berdasarkan jumlah keluaran yang terbaik yaitu dalam arti mendekati angka 1.000 adalah MA yaitu sebesar 1.000 sedangkan yang terkecil adalah SMK sebesar 956 dan untuk SMA sebesar 996 . Untuk jumlah tahun siswa yang seharusnya 3000 untuk tingkat SMA sebesar 3.001, MA sebesar 3.002 dan sebesar 2.951 Untuk SMK. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0% adalah MA Sebesar 0 dan terbesar terdapat pada SMK sebesar 1.70, dan untuk SMA sebesar 1,62. selanjutnya, jumlah mengulang yang mendekati 0% atau yang lebih baik adalah pada tingkat MA sebesar 2 diikuti oleh SMA sebesar 6 dan SMK sebesar 8.

Dari ketiga jenis sekolah ditingkat SM dapat diketahui dimana dari ketiganya yang lebih efisien adalah dengan menentukan indikator rata-rata lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar siswa untuk tingkat SM seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 3 tahun yang berarti tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah, dimana untuk SMA sebesar 3,01, MA sebesar 3,00

dan SMK sebesar 3,01. Bila dilihat lama belajar putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah lama belajar yang terburuk adalah SMK yaitu sebesar 1,70, Di samping itu, rata-rata lama belajar kohort merupakan rata-rata dari lulusan dan putus sekolah pada SMA sebesar 3,00 dan SMK sebesar 2,95. Jika dibandingkan efisien mana antara ketiga jenis sekolah tersebut juga dapat dilihat dari tahun siswa terbuang. Tahun – siswa terbuang karena mengulang lebih baik SMA sebesar 11. sehingga secara gabungan antara mengulang dan putus sekolah yang lebih baik juga SMA. Bila dilihat tahun masukan per lulusan maka SMA juga terbaik jika dibandingkan dengan SMK dan MA. Dengan mendasarkan pada 10 jenis indikator untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa SMA Memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya. Hal ini disebabkan hubungan antara guru dengan siswa dapat terjalin dengan baik salah satunya melalui jam tambahan belajar atas permintaan para siswa melalui orang tua mereka, sehingga pada waktu diadakan pertemuan antara pihak sekolah dengan orang murid banyak yang mengajukan usulan untuk diadakan tambahan jam pelajaran dan ditanggapi secara positif oleh para guru sehingga pelaksanaan jam tambahan dapat berjalan dengan lancar karena tidak ada paksaan dari pihak sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan bagi semua siswa yang ada.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan data yang terdapat dalam pelaksanaan pendidikan dan kajian terhadap hasil indikator pendidikan seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi internal pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

### 1. Dipandang dari segi pemerataan.

Perkembangan Pendidikan dari segi pemerataan pendidikan di Kabupaten Klaten dapat di jelaskan dengan beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Rasio Pendidikan, dan prosentase angka melanjutkan. Berdasarkan APK yang ada ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 123,01% dan yang terendah di tingkat SM/MA yaitu 75,27%, sedangkan untuk tingkat SMTP+MTs sebesar 95,37%. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan jender dilihat dari APK pada tingkat SD/MI dibandingkan dengan SLTP/MTs maupun SMA/MA, dimana untuk SD/MI APK untuk laki-laki sebesar 123,31%, untuk perempuan 122,70%, sedangkan untuk SLTP/MTs APK untuk laki-laki sebesar 93,32% dan untuk APK perempuan sebesar 97,58%, sedangkan untuk tingkat SLTA untuk APK laki-laki sebesar 71,92, dan untuk APK SLTA Perempuan sebesar 78,78. Untuk APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 105,79% dan terendah di tingkat SM+MA yaitu 50,70%, sedangkan untuk tingkat SLTP sebesar 68,75%. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di tingkat SM dengan angka 477 dan terjarang terdapat di tingkat SD dengan angka 127. Rasio siswa per kelas terpadat terdapat di tingkat SMP+MA yaitu 35 dan terjarang terdapat di tingkat SD+MI yaitu 22 dan untuk SMP+MTs sebesar 33. sedangkan untuk rasio siswa per Guru terdapat kesamaan antara SMTP+MTs dan SM+MA yaitu 12 untuk SD+MI yaitu 13. Rasio Kelas per Ruang kelas juga ada kesamaan antara SMP+MTs dan SM/MA yaitu 0,93 dan SD/MI sebesar 0,91, hal itu berarti, bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah Ruang kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali.

Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SLTP dan SD yang cukup tinggi, angka melanjutkan ke tingkat SLTA yaitu 83,45. Sedangkan, angka melanjutkan ke tingkat SMP mencapai angka 102,91, Berdasarkan indikator diatas dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dari segi pemerataan dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SLTP dan tingkat SD kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut. Capaian diatas juga dipengaruhi pendidikan pra sekolah di Kabupaten Klaten yaitu pendidikan TK dan RA, dimana untuk TK di Kabupaten Klaten berjumlah 519 lembaga dengan jumlah murid sebanyak 18.486 siswa dengan tenaga pengajar sebanyak 1.724 orang, dan untuk RA berjumlah 328 lembaga dengan jumlah siswa 11.565 dan tenaga pengajar 880 orang.

### 2. Dipandang dari segi peningkatan mutu

Peningkatan Mutu Pendidikan dapat dijabarkan dengan beberapa Indikator mutu anatara lain indikator mutu yaitu: (1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu sumber daya manusia (SDM), (4) mutu fasilitas, dan (5) biaya. Penjabaran dari Indikator mutu proses yaitu Angka Masukan Kasar (AMK) dan tertinggi terdapat pada jenjang SLTP sebesar 102,91 diikuti tingkat SLTA sebesar 83,45%, dan SD/MI sebesar 42,01%, untuk angka mengulang, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada tingkat SD/MI yaitu 3,88 pada tingkat SLTP yaitu sebesar 0,14 dan SLTA besarnya 0,15. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SM+MA yaitu sebesar 0,84% dan terendah terdapat pada tingkat SLTP yaitu sebesar 0,20% diikuti tingkat SD/MI sebesar

0,06%. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka tertinggi terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 99,66% dan terendah terdapat pada tingkat SLTP sebesar 98,29% , sedangkan untuk tingkat SLTA sebesar 99,37%. Dari mutu SDM (guru), maka %tase guru yang layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SLTA yaitu 92,92% dan guru yang layak mengajar terendah adalah pada tingkat SD/MI sebesar 45,29%, sedangkan untuk tingkat SLTP sebesar 84,05%, sedangkan untuk guru yang tidak layak mengajar terbesar terdapat pada SD+MI sebesar 54,71% dan terendah terdapat pada SLTA sebesar 7,08%, dan untuk tingkat SLTP sebesar 15,95%.

Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SM+MA sebesar 93,88% sedangkan terendah terdapat SD+MI sebesar 66,09%, dan untuk SLTP sebesar 85,92%. sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat SD/MI yaitu sebesar 9,92% dan terendah terdapat pada SLTA sebesar 0,23%, dan untuk tingkat SLTP sebesar 1,29%. Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada, antara lain ruang perpustakaan, lapangan olahraga, ruang UKS, fasilitas laboratorium, Ruang BP, ruang serba guna, bengkel, dan ruang praktik lainnya.. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SLTP yaitu sebesar 81,82% dan terendah ada pada tingkat SD+MI sebesar 31,40%. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada tingkat SLTA yaitu sebesar 4,49% dan terkecil terdapat pada SD/MI sebesar 0%. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar juga terdapat pada tingkat SLTA terbesar yaitu sebesar 95,51% dan terendah terdapat pada SD/MI sebesar 30,94. Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, yayasan, orang tua siswa, pemda dan

lainnya. Untuk tingkat SLTP terbesar terdapat pada angka partisipasi pemda sebesar 63,38% sedangkan untuk tingkat SD+MI prosentase terbesar terdapat pada tingkat pemda juga sebesar 62,48% dan untuk tingkat SM+MA prosentase terbesar juga terdapat pada angka partisipasi pemda juga sebesar 57,77%, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemerintah daerah dalam pengembangan pendidikan sangat tinggi sekali. Berdasarkan Indikator mutu diatas dan dengan melihat pencapaian setiap Indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SLTA mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD dan tingkat SLTP Kinerja yang lebih unggul diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu tingkat tersebut.

### **3. Dipandang dari segi efisiensi internal.**

Dari segi efisiensi internal Indikator yang digunakan meliputi jumlah keluaran, jumlah tahun siswa, jumlah putus sekolah, jumlah mengulang, lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masukan per input dan rasio keluaran dan masukan. Dari analisa diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah keluaran yang terbaik dengan angka 1000 adalah pada tingkat terkecil terdapat pada SMK sebesar 956 untuk SLTP+MTS sebesar 996, sedangkan untuk SD+MI sebesar 986. Jumlah tahun-siswa yang seharusnya 6000 telah memenuhi standar yang ditetapkan yaitu sebesar 6.215 untuk tingkat SD dan 3000 untuk tingkat SLTP dan SM, dan yang memiliki nilai terbesar adalah pada tingkat SLTP+MTs sebesar 2.999, SMA+MA sebesar 3.001 dan untuk SMK sebesar 2.951. Jumlah putus sekolah yang terbaik yaitu mendekati 0%, terdapat pada SMA+MA yaitu sebesar 3, sedangkan terbesar terdapat pada SMK sebesar 44. sedangkan untuk jumlah mengulang terkecil terdapat pada SLTP, yaitu sebesar 4 sedangkan terbesar terdapat pada jenjang SD+MI sebesar 260.

Untuk melihat efisiennya suatu sekolah dapat dilihat dari rata-rata lama belajar siswa. Untuk tingkat SD/MI seharusnya lama belajar sampai lulus atau disebut rata-rata lama belajar lulusan adalah 6 tahun dan tingkat SLTP dan SM+SMK seharusnya 3 tahun, sehingga tidak ada siswa yang mengulang atau putus sekolah. Rata-rata lama belajar lulusan ini yang paling penting untuk menentukan efisien tidaknya suatu sekolah. Berdasarkan rata-rata lama belajar lulusan antara SD, SMP dan SM hampir kondisinya baik, yakni rata-rata 6 untuk SD dan rata-rata 3 untuk SLTP dan SLTA. Bila dilihat putus sekolah, ternyata kondisi putus sekolah yang terburuk adalah pada tingkat SMK yaitu sebesar 75 yang berhenti hanya beberapa tahun sekolah telah mengalami putus sekolah. Sedangkan untuk angka mengulang terbesar terdapat pada SD+MI sebesar 675 dan terkecil terdapat pada tingkat SLTP+MTS yaitu 7 siswa. Efisien atau tidaknya suatu sekolah juga dapat dilihat dari tahun siswa terbuang. Untuk jumlah tahun siswa terbuang terbaik terdapat SMP+MTs sebesar 40, untuk tingkat SD+MI sebesar 704 dan 66 untuk SMA+MA, sedangkan SM+SMK sebesar 63. Dengan mendasarkan pada indikator tersebut diatas untuk efisiensi internal sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat SD/MI memiliki kinerja yang terbaik dilihat dari sisi efisiensi internal pendidikan yang digambarkan dari banyaknya nilai yang positif dari setiap indikator efisiensi. Pemborosan biaya dihasilkan dari tidak efisiennya sistem pendidikan yang ada. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, karena adanya tahun-siswa terbuang yang makin besar menyebabkan terjadi pemborosan biaya yang besar juga. Pada Tabel 3.13 dicantumkan pemborosan biaya menurut jenis sekolah. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemborosan yang paling besar terjadi pada jenis sekolah

SD+MI sebesar Rp 143.695.651.038.259, sedangkan pemborosan yang terkecil terdapat pada jenis sekolah SM+SMK yaitu sebesar Rp 9.440.417.599,-.

## REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Adanya pendataan khusus yang menjelaskan antara pendataan siswa yang berasal dari Kota dan yang berasal dari luar kota agar diketahui tingkat APK Kota/Kabupaten dan APK gabungan antara Kota dan Luar Kota, sehingga mudah dalam merencanakan pendidikan terutama terkait dengan segi pemerataan pendidikan.
2. Perlu didirikan Taman Kanak-kanak yang lebih banyak sehingga akan meningkatkan mutu pendidikan tingkat SD.
3. Angka mengulang dan putus sekolah di tingkat SD perlu diturunkan yaitu dengan cara kebijakan pemerintah dengan memberikan beasiswa. atau bimbingan dan penyuluhan kepada setiap siswa dan orang tua oleh sekolah yang bersangkutan, hal ini juga dipengaruhi jumlah siswa di SD lebih besar daripada jenjang lainnya
4. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBD II yang selama ini telah diberikan oleh Pemerintah Daerah hendaknya tetap dipertahankan dan kalau dimungkinkan untuk ditambah nominalnya untuk mencapai program pemerintah dalam menciptakan sekolah gratis dan bermutu.
5. Perlu ditingkatkan kemampuan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar, untuk itu perlu dipikirkan peningkatan pendidikan guru yang dapat meningkatkan mutu guru tetapi tidak perlu mengganggu jadwal mengajarnya, dengan pemberian

beasiswa untuk melanjutkan sekolah atau program penyesuaian.

6. Perlu dilakukan rehabilitasi bagi ruang kelas yang rusak berat terutama pada tingkat SD/MI s.d. SM.
7. Oleh karena perpustakaan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh sekolah, maka perlu dibangun perpustakaan tingkat SD, tingkat SLTP, dan tingkat SM.
8. Perlu dikembangkan laboratorium untuk setiap sekolah dalam rangka peningkatan mutu.
9. Kurikulum muatan lokal hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga apa yang diajarkan dalam mata pelajaran muatan lokal dapat diaplikasikan di daerah masing-masing.
10. Perlu dilakukan penjurusan di SMA menggunakan prosedur gabungan

antara prestasi dengan minat sehingga akan dihasilkan lulusan yang bermutu.

11. Perlu dikaji ulang kelompok SMK di daerah sehingga lulusannya dapat tertampung di daerah yang bersangkutan dengan mengurangi migrasi.
12. Agar tidak terjadi pemborosan biaya yang sangat besar, maka pada setiap jenis sekolah agar diupayakan untuk mengurangi siswa yang putus sekolah dan mengulang untuk semua jenis sekolah.
13. Berkaitan dengan perkembangan IT disetiap jenjang/sekolah perlu diadakan pelatihan khusus berkaitan dengan perkembangan teknologi.
14. Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang berbasis IT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*, Rienika Cipta, Jakarta.
- Conyes. 1994. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Berbagai Program Pembangunan," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 2, April, hal. 57.
- Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Bumi Aksara.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Penerbit LPFE-UI.
- Glasson, John. 1990. *Pengantar Perencanaan Regional*. Terjemahan Paul Sitohang. Jakarta: Penerbit: LPFE-UI.
- Handoko, Hani. 1991. *Manajemen*, Yogyakarta.
- Indra, Fahrudi. 1989. *Administrasi Pendidikan*. Penerbit IKIP Malang.
- Irawan, Prasetya. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta :STIALAN PRESS.
- Mikkelsen. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Berbagai Program Pembangunan," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 2, April, hal. 56-57.
- Mintorogo. 1997. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Jakarta: STIALAN PRESS.
- Mustopadidjadja. 2002. *Pemberdayaan Wilayah Melalui Otda Dalam Menyongsong Era Perdagangan Bebas*. Jakarta.
- Mussadun. 2000. *Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992*. "Tata Loka Vol. 5."
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke Sepuluh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rukmana, Nana. 2007. *Meraih Sukses & Kebahagiaan Hidup*. Penerbit Alfa Beta Bandung.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (2010). *Profil Pendidikan Tahun 2010*. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.
- Dinas Pendidikan kabupaten Klaten, *Laporan Individu (LI) TK-SM Tahun Pelajaran 2011/2012*.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, *Statistik data Sekolah Tahun Pelajaran 2011/2012*.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, *Rangkuman Data Sekolah Menengah Pe Kecamatan (Buku 2) Tahun Pelajaran 2011/2012* Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (2011/2012).
- Pemerintah Kabupaten Klaten (2009). *Klaten Dalam Angka 2008.*, Bappeda dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tahun 2009.
- Rangkuman Kabupaten Klaten Sekolah Menengah (RK-SM) Tahun 2011/2012 Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten (2010/2011).
- Rangkuman Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2010/2011. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.